



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 13
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Dengar Pendapat / ke-5
Dengan	: Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Bimas Kristen, Direktur Jenderal Bimas Katholik, Direktur Jenderal Bimas Hindu, Direktur Jenderal Bimas Buddha, serta Kepala Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 25 September 2017
Waktu	: Pukul 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat	: H. Abdul Malik Haramain, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto, S.H
Acara	: Pendalaman Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K-L) Tahun Anggaran 2018
Hadir	: 1. orang dari 48 orang Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. Inspektur Jenderal Kemenag RI beserta jajaran, 3. Direktur Jenderal Bimas Kristen Kemenag RI beserta jajaran, 4. Direktur Jenderal Bimas Katholik beserta jajaran, 5. Direktur Jenderal Bimas Hindu Kemenag RI beserta jajaran, 6. Direktur Jenderal Bimas Buddha Kemenag RI beserta jajaran, 7. Kepala Balitbang dan Diklat Kemenag RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abdul Malik Haramain, M.Si. sesuai tempat dan acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI bersama Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan agenda “**Pendalaman RKA-K/L Tahun 2018**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018 sebesar **Rp127.597.478.000,-** (*seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) yang dialokasikan untuk kegiatan:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	%
1.	Pengawasan Fungsional Pendidikan	36.222.115.000	28,4%
2.	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah I	4.348.603.000	3,4%
3.	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah II	2.169.142.000	1,7%
4.	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah III	1.661.170.000	1,3%
5.	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah IV	1.611.921.000	1,3%
6.	Pengawasan Fungsional Inspektorat Investigasi	4.832.718.000	3,8%
7.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	76.751.809.000	60,2%
Jumlah		127.597.478.000	100%

2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 sebesar **Rp1.893.576.212.000,-** (*satu triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah*), yang dialokasikan untuk kegiatan:

No	Kegiatan	Anggaran	%
1.	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	90.830.580.000	4,8%
2.	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	168.438.819.000	8,9%
3.	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen	210.292.633.000	11,1%
4.	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	126.169.653.000	6,7%
5.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	1.297.844.527.000	68,5%
Jumlah		1.893.576.212.000	100%

3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 sebesar **Rp910.316.219.000,-** (*sembilan ratus sepuluh miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah*), yang dialokasikan untuk kegiatan:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	%
1	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik (2131)	65.214.745.000	7,16
2	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik (2139)	109.866.131.000	12,07
3	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik (2140)	62.389.343.000	6,85
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik (2141)	127.347.576.000	13,99

5	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik (5102)	545.498.424.000	59,93
TOTAL		910.316.219.000	100%

4. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 sebesar **Rp773,510,633,000,-** (*tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), yang dialokasikan untuk kegiatan:

No	KEGIATAN	ANGGARAN	%
1	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu (2142)	60,349,609,000	7,80%
2	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu (2143)	63,645,235,000	8,23%
3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu (2144)	61,333,446,000	7,93%
4	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu (5103)	472,685,401,000	61,11%
5	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu (5104)	115,496,942,000	14,93%
TOTAL		773,510,633,000	100 %

5. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 sebesar **Rp279.422.135.000,-** (*dua ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*), yang dialokasikan untuk kegiatan:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	%
1	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	37.982.946.000	13,59

2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	26.123.348.000	9,35
3	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	64.105.446.000	22,94
4	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	128.078.231.000	45,84
5	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha	23.132.164.000	8,28
JUMLAH		279.422.135.000	100,00

6. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 sebesar **Rp600.793.776.000,-** (*enam ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*), yang dialokasikan untuk kegiatan:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	%
1	Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	17.994.613	3,00%
2	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	35.816.188	5,96%
3	Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	2.769.383	0,46%
4	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	18.320.034	3,05%
5	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi	10.198.370	1,70%
6	Pendidikan dan Pelatihan Administrasi di Lembaga Pendidikan	70.056.144	11,66%
7	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan	137.520.669	22,89%
8	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan	35.121.056	5,85%
9	Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	9.010.278	1,50%
10	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Litbang dan Diklat	263.987.041	43,94%
Jumlah		600.793.776	100%

7. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2018 untuk Satuan Kerja Kementerian Agama RI sebagai berikut:

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI sebesar **Rp55.845.989.000,-** (*lima puluh lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*) yang akan dialokasikan untuk:
 - 1) Pengawasan terhadap kegiatan prioritas bidang pendidikan;
 - 2) Perluasan jangkauan pengawasan serta pendampingan pada Satuan Kerja;
 - 3) Peningkatan kualitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 4) Rencana pengangkatan 63 (enam puluh tiga) orang auditor baru.

- b. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebesar **Rp85.000.000.000,-** (*delapan puluh lima miliar rupiah*) yang akan dialokasikan untuk:
 - 1) Event Pesparawi Nasional Rp.70 M;
 - 2) Kegiatan Pembinaan Penyuluh Agama Kristen sebesar Rp.15 M.

- c. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebesar **Rp104.000.000.000,-** (*seratus empat miliar rupiah*) yang akan dialokasikan untuk:
 - 1) Kebutuhan tambahan untuk Fungsi Agama sebesar Rp34.000.000.000,- (*tiga puluh empat miliar rupiah*) untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) Katolik Nasional 2018;
 - 2) Kebutuhan untuk Fungsi Pendidikan adalah sebesar Rp70.000.000.000,- (*tujuh puluh miliar Rupiah*) untuk Peningkatan Mutu dan Sarana Prasarana Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

- d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebesar **Rp38,511,706,000** (*tiga puluh delapan miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus enam ribu rupiah*) yang akan dialokasikan untuk:

NO	USULAN	JUMLAH
1	Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	15,836,706,000
2	Penambahan sasaran pembinaan tenaga penyuluh dan operasional penyuluh	9,000,000,000
3	Penambahan sasaran dialog kerukunan dengan menambah desa binaan kerukunan	2,000,000,000
4	Penambahan sasaran bimbingan keluarga sukinah	3,675,000,000
5	Pembentukan kelompok binaan penyuluh	6,000,000,000
6	Pemulihan Pasca Bencana Gunung Agung	2,000,000,000
	TOTAL	38,511,706,000

e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebesar **Rp30,000,000,000,-** (*tiga puluh miliar rupiah*) yang akan dialokasikan untuk:

- 1) Pengadaan Kitab Suci Agama Buddha belum terbiayai sebanyak 20.000 eksemplar sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*tiga miliar rupiah*); dan
- 2) Bantuan rehabilitasi/ renovasi/ pembangunan rumah ibadah sebanyak 165 lokasi sebesar Rp. 27.000.000.000,- (*dua puluh tujuh miliar rupiah*).

f. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI sebesar **Rp74.292.000.000,-** (*tujuh puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah*), yang akan dialokasikan untuk:

- 1) Penelitian Indeks (Kerukunan Umat Beragama, Kesalehan Sosial, Layanan Keagamaan semua agama, Layanan KUA dan Kepuasan Haji) sebesar Rp25.174.750.000,- (*dua puluh lima miliar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- 2) Diklat Penyuluh Non PNS (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha) dengan target yang masih belum terpenuhi sebanyak 15.113 orang sebesar Rp49.117.250.000,- (*empat puluh sembilan miliar seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

8. Komisi VIII DPR RI mendesak Satuan Kerja Kementerian Agama RI untuk bersungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
- a. Melakukan kajian mengenai efektivitas program keagamaan yang telah diselenggarakan.
 - b. Memfokuskan pelaksanaan program keagamaan pada upaya pembentukan moral.
 - c. Memperbaiki rencana kerja dan anggaran fungsi agama dan pendidikan keagamaan berdasarkan aspirasi daerah.
 - d. Meningkatkan kualitas penelitian atas isu-isu aktual dan sebagai upaya menunjang peningkatan kinerja Kementerian Agama RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.00 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

ttd

H. ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si